

PBB: Krisis Utang Menghambat Negara-Negara Afrika Sub-Sahara, Membahayakan Kemajuan Alam Mengakhiri AIDS

Artikel Terjemahan

Penang, 20 Sep (Kanaga Raja) — Utang publik yang terus meningkat menghambat negara-negara Afrika Sub-Sahara (SSA), yang membahayakan kemajuan yang telah dicapai dalam mengakhiri AIDS, menurut Program Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HIV/AIDS (UNAIDS).

Dalam laporan baru UNAIDS yang berjudul *“Domestic revenues, debt relief and development aid: Transformative pathways for ending AIDS by 2030,”* menyatakan bahwa krisis utang meninggalkan negara-negara SSA dengan ruang fiskal yang sedikit untuk membiayai kesehatan dan layanan HIV yang kritis.

Menurut UNAIDS, Afrika Sub-Sahara menyumbang jumlah terbesar orang yang hidup dengan HIV, dengan lebih dari 25,9 juta orang dari total 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia.

Keberhasilan wilayah ini dalam mengurangi infeksi HIV baru yakni sebesar 56% sejak 2010 tidak akan berkelanjutan jika ruang fiskal dibatasi, kata laporan tersebut.

UNAIDS menemukan bahwa kombinasi pembayaran utang publik yang terus meningkat dan pemotongan belanja yang ditetapkan dalam perjanjian IMF dalam tiga hingga lima tahun ke depan, jika tidak ditangani, akan meninggalkan negara-negara tersebut kekurangan sumber daya untuk mendanai respons HIV mereka.

Misalnya, laporan tersebut menyatakan bahwa pelayanan utang kini melebihi 50% dari pendapatan pemerintah di Angola, Kenya, Malawi, Rwanda, Uganda, dan Zambia.

Bahkan setelah langkah-langkah penghapusan utang, Zambia masih akan membayar dua pertiga anggarannya untuk pelayanan utang antara 2024 dan 2026, dikatakan.

“Ketika negara-negara tidak dapat secara efektif memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan masyarakatnya karena pembayaran utang, keamanan kesehatan global akan terancam,” kata Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima.

“Utang publik perlu segera dikurangi dan mobilisasi sumber daya domestik diperkuat untuk memungkinkan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai respons HIV global secara penuh dan mengakhiri AIDS,” tambahnya.

Menurut laporan UNAIDS, yang menyoroti wilayah Afrika timur dan selatan serta Afrika barat dan tengah, pandemi COVID-19 dan krisis-krisis kompleks 2023-2024 telah merusak kemajuan puluhan tahun dalam kesehatan global dan memperlambat kemajuan dalam respons terhadap HIV.

Laporan tersebut menyatakan bahwa bahkan sebelum COVID-19, target Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pengurangan 75% dalam jumlah infeksi HIV baru antara 2010 dan 2020 sudah sangat menyimpang.

Menyoroti tantangan utama dalam pembiayaan, laporan tersebut menyatakan bahwa secara global, US\$20,8 miliar disediakan pada tahun 2022 untuk program HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dari sumber domestik dan internasional.

Pendanaan ini – yang sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya – berada di bawah tekanan yang semakin meningkat, tambahannya.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dalam hal dukungan donor internasional, prioritas lain seperti kebutuhan untuk merespons krisis kemanusiaan yang mendesak, perubahan iklim dan bencana alam lainnya, kebutuhan untuk mendukung pengungsi di negara donor, serta kekurangan pendanaan yang semakin meningkat untuk hampir semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, mengancam untuk mengalihkan dana internasional yang sangat dibutuhkan dari kesehatan dan respons HIV.

Pendapatan pajak domestik juga menghadapi prioritas yang bersaing, terutama pengalihan untuk membayar pelayanan utang yang terus meningkat, dengan 60% negara berpenghasilan rendah berada pada risiko tinggi terhadap tekanan utang atau sudah berada dalam situasi tekanan utang.

Perkembangan ini mengancam untuk merusak tujuan yang disepakati secara internasional untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030, kata laporan tersebut.

AFRIKA BARAT & TENGAH

Untuk wilayah Afrika barat dan tengah, laporan tersebut menyatakan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk respons HIV di Afrika barat dan tengah tidak sebesar di Afrika timur dan selatan (yang memiliki beban penyakit yang lebih tinggi), tetapi tetap sangat tinggi di wilayah yang menjadi rumah bagi beberapa negara termiskin dan paling rentan di dunia.

Pada tahun 2022, kebutuhan pembiayaan untuk respons HIV (d disesuaikan dengan inflasi sejak 2019) mencapai \$2,98 miliar untuk wilayah secara keseluruhan.

Sebagai perbandingan, \$2,03 miliar dana aktual telah dicairkan, meninggalkan kesenjangan pembiayaan sekitar \$950 juta atau 32%.

Laporan tersebut menyatakan bahwa wilayah ini sangat bergantung pada bantuan pembangunan untuk mendanai respons HIV.

Sejak 2017, dana donor internasional telah menyumbang lebih dari 60% dari pengeluaran wilayah untuk respons HIV.

Pada tahun 2022, donor internasional memberikan total \$1,24 miliar kepada wilayah tersebut, di mana lebih dari setengahnya disediakan oleh AS dan Global Fund.

Meskipun banyak negara di Afrika barat dan tengah mengakui perlunya mobilisasi lebih banyak dana domestik untuk mendanai respons HIV, wilayah ini menghadapi tantangan signifikan dalam mobilisasi sumber daya domestik, menurut UNAIDS.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa pendapatan pajak telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan masih di bawah level pra-pandemi jika diukur sebagai proporsi dari PDB.

Pada tahun 2017, pendapatan pajak rata-rata mencapai 13,2% dari PDB di seluruh wilayah, tetapi angka ini turun menjadi hanya 11,9% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pendapatan pajak diproyeksikan hanya sedikit meningkat menjadi 12,2% dari PDB.

Laporan tersebut menyatakan bahwa hanya empat negara yang meningkatkan pendapatan pajak mereka lebih dari 1% dari PDB selama periode ini – Burkina Faso, Burundi, Republik Demokratik Kongo, dan Senegal.

Kamerun, Chad, Guinea-Bissau, dan Nigeria semua mengalami stagnasi pendapatan antara 2017 dan 2023, sementara negara-negara lain di wilayah tersebut mengalami penurunan pendapatan pajak – kadang-kadang secara signifikan.

Gambia, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Ghana juga mengalami penurunan setidaknya 3% dari PDB, dan lima negara lainnya melebihi 2%.

Karena tekanan baru-baru ini pada bantuan pembangunan dan pendapatan pajak domestik, data menunjukkan bahwa jumlah yang dibelanjakan untuk respons HIV sebagai proporsi dari PDB mengalami penurunan.

Meskipun data tidak komprehensif di seluruh wilayah, mereka menunjukkan bahwa pengeluaran untuk respons HIV menurun dari 0,3% dari PDB pada tahun 2017 menjadi hanya 0,12% dari PDB pada tahun 2022, kata laporan tersebut.

Yang terpenting dari laporan tersebut adalah tidak adanya negara di wilayah ini yang mencatat peningkatan pengeluaran untuk respons HIV ketika diukur sebagai proporsi dari PDB.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pengeluaran untuk kesehatan telah menurun di Afrika barat dan tengah sejak 2017. Pada tahun 2017, anggaran pemerintah untuk kesehatan mencapai rata-rata 1,86% dari PDB.

Angka ini sedikit meningkat, menjadi sedikit lebih dari 2,1% dari PDB pada tahun 2020 dan 2021 di tengah pandemi COVID-19, tetapi telah turun sejak itu dan diperkirakan hanya mencapai 1,81% dari PDB pada tahun 2023.

Laporan tersebut menyatakan bahwa sumber tekanan utama pada pembiayaan untuk respons HIV dan sektor sosial adalah utang publik yang tinggi. Gambaran utang publik di Afrika barat dan tengah sangat menantang: 11 negara telah merestrukturisasi utangnya dalam beberapa tahun terakhir atau sedang dalam proses restrukturisasi atau menunggak, sementara Sierra Leone berada pada risiko "tinggi" terhadap tekanan utang.

Sembilan negara lainnya berada pada risiko "moderat" terhadap tekanan utang, dan tidak ada yang berada pada risiko rendah terhadap masalah utang.

“Utang telah meningkat dengan cepat, hampir 10% dari PDB antara 2018 dan 2023 – dari sedikit lebih dari 53,2% dari PDB rata-rata menjadi lebih dari 62% pada tahun 2023.”

Laporan tersebut menyatakan bahwa peningkatan akumulasi utang yang sangat besar selama periode ini terlihat di Burkina Faso, Burundi, Republik Kongo, Pantai Gading, Ghana, Liberia, Senegal, dan Sierra Leone, yang semuanya mengalami peningkatan utang setidaknya 15% dari PDB.

“Peningkatan stok utang baru-baru ini, inflasi yang lebih tinggi, dan suku bunga telah secara dramatis meningkatkan beban pelayanan utang ini.”

Data menunjukkan bahwa sementara pendapatan turun sebesar 1% dari PDB di wilayah tersebut antara 2017 dan 2023, pelayanan utang publik, sebaliknya, meningkat sebagai persentase dari PDB dari 6,4% menjadi lebih dari 10% rata-rata.

Jumlah yang kini dibelanjakan untuk pelayanan utang publik lebih dari 5,5 kali anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kesehatan publik rata-rata di wilayah tersebut sebagai persentase dari PDB, kata laporan tersebut.

Pelayanan utang meningkat tajam di Burkina Faso, Burundi, Chad, Republik Kongo, Pantai Gading, Ghana, Guinea, dan Sierra Leone, yang semuanya mengalami peningkatan pelayanan utang sebagai persentase dari PDB lebih dari 4% antara 2018 dan 2023, tambahnya.

Hanya enam negara di wilayah tersebut yang mengalami penurunan pelayanan utang/PDB antara 2017 dan 2023: Benin, Cabo Verde, Mauritania, Nigeria, Gambia, dan Togo.

Akibatnya, pelayanan utang publik menyerap proporsi yang semakin besar dari pendapatan pajak di seluruh wilayah. Pelayanan utang menyerap sedikit lebih dari 31% dari pendapatan pada tahun 2017, meningkat menjadi 46,6% yang diproyeksikan pada tahun 2023, tambahnya.

Demikian pula, pelayanan utang mewakili proporsi yang semakin besar dari pengeluaran publik, meningkat dari 46% pada tahun 2017 menjadi 61,5% yang diharapkan pada tahun 2023.

“Peningkatan substansial dalam pelayanan utang sebagai persentase dari pendapatan terlihat di Burkina Faso, Kamerun, Chad, Republik Kongo, Pantai Gading, Ghana, Guinea, Mali, Sao Tome dan Principe, serta Sierra Leone.”

Pada tahun 2024, disesuaikan dengan proyeksi inflasi, Afrika barat dan tengah perlu memobilisasi \$4,18 miliar untuk mendanai respons HIV secara penuh. Angka ini akan meningkat menjadi \$7,9 miliar pada tahun 2030.

Nigeria sendiri menyumbang lebih dari \$4,5 miliar dari total \$7,9 miliar yang diperlukan pada tahun 2030 oleh wilayah tersebut, kata laporan itu.

Disesuaikan dengan inflasi, pada tahun 2024, wilayah Afrika barat dan tengah perlu membelanjakan rata-rata 0,67% dari PDB untuk merespon HIV, meningkat menjadi 0,79% dari PDB pada tahun 2030. Ini dibandingkan dengan hanya 0,12% pada tahun 2022.

Dalam skenario pembiayaan yang biasa, mencapai peningkatan pengeluaran ini akan sulit. Pendapatan pajak diproyeksikan akan meningkat hampir 2% dari PDB, dari 12,84% pada tahun 2024 menjadi 14,8% pada tahun 2030.

“Meskipun ada peningkatan ini, wilayah ini masih tertinggal jauh dibandingkan banyak wilayah lain di dunia dalam hal mobilisasi pendapatan domestik.”

Pada saat yang sama, kewajiban atas utang akan tetap di atas 10% dari PDB rata-rata setiap tahun antara 2024 dan 2030.

Debt service atau kewajiban utang juga diproyeksikan akan menyerap, rata-rata, hampir 55,5% dari pendapatan pajak dan mewakili lebih dari 50% dari pengeluaran publik pada tahun 2030, menurut UNAIDS.

Pada saat yang sama, laporan tersebut menyatakan bahwa Afrika barat dan tengah tetap sangat rentan terhadap berbagai tekanan dan risiko, termasuk guncangan bantuan dan guncangan pandemi lainnya.

Dalam skenario di mana tingkat bantuan pembangunan tetap stagnan dalam istilah dolar AS antara 2024 dan 2030 dibandingkan dengan tingkat yang terlihat pada tahun 2022, jumlah pembiayaan publik dan swasta domestik perlu meningkat sebesar 23% setiap tahun hingga 2030 untuk mendanai respons HIV secara penuh, tambahnya.

Namun, dalam situasi dimana dana donor internasional untuk respons HIV menurun sebesar 5% setiap tahun dibandingkan dengan tingkat yang terlihat pada tahun 2022, negara-negara perlu meningkatkan pembiayaan domestik sebesar 35% per tahun untuk menutup kesenjangan pembiayaan tambahan.

Bahkan merujuk pada laporan tersebut, dalam skenario yang sangat optimis dimana kerjasama pembangunan untuk HIV meningkat sebesar 5% setiap tahun dari level 2022, ini hanya akan memobilisasi \$1,74 miliar pada tahun 2030, meninggalkan wilayah ini perlu memobilisasi \$6,16 miliar pada tahun 2030 dari sumber lain.

Sumber Artikel:

<https://www.twn.my/title2/finance/2024/fi240902.htm>

Narahubung:

Komang Audina Permana Putri, audina@igj.or.id
Program Officer Isu Keuangan Berkelanjutan dan Utang,
Indonesia for Global Justice